



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Kecamatan Dumai Kota

L K j - I P
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja
Kecamatan Dumai Kota
Tahun 2022



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Kota merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 berarti Kecamatan Dumai Kota telah menyelesaikan program dan kegiatannya dalam upaya memenuhi visi, misi dan tujuannya. Selama tahun 2022, capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 telah berhasil dicapai, dan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Kota untuk mempertanggungjawabkan seberapa jauh keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi dan penyampaian informasi kinerja kepada Pemerintah Kota Dumai, DPRD dan masyarakat.

Akhir kata, diharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk masa yang akan datang bagi Kecamatan Dumai Kota khususnya, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Dumai, Januari 2022
CAMAT,


INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si
Pembina IV/a
NIP.19820211 200312 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022 ini dibagi dalam 3 (tiga) Bab, di dalam setiap Bab memaparkan dan menjabarkan hal-hal sesuai ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Dumai Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Kota Tahun Anggaran 2022 ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam tahun 2022, dikaitkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota Tahun 2021-2026. Pada tahun 2022 ini, Kecamatan Dumai Kota telah melaksanakan 4 Program yang terdiri dari 14 Kegiatan dan 43 (Empat puluh Tiga) Sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari sasaran-sasaran yang telah termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Kinerja dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dumai Kota telah mencapai sasaran dan memiliki kinerja yang sangat baik. Peningkatan kinerja tersebut sebagai wujud pencapaian Visi Kota Dumai khususnya Kecamatan Dumai Kota dan merupakan langkah nyata pembangunan pemerintah di Kota Dumai.

Berdasarkan table dibawah ini terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran sudah mencapai target capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahunan	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	89,87	103,2
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100	100	100

Hasil Pengukuran Kinerja diatas menunjukkan bahwa dari Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022 menunjukkan bahwa :

- **Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis** adalah 100 % dengan kategori Berhasil
- **Capaian indikator kinerja utama** dari 3 indikator kinerja utama adalah 100% menyelaraskan dengan capaian terhadap Renstra Kecamatan Dumai Kota Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan Kecamatan Dumai Kota telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 11.281.034.946 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 10.944.772.000,- atau 97%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran adalah Rp. 1.070.096.194,-,Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 1.103.336.776,-, atau terserap 96,98%.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Strategis	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Dasar Hukum	6
F. Sistematika Penyajian.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja	16
C. Perjanjian Kinerja.....	17
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	20
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	37
Lampiran	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Sasaran Strategis RPJMD Kecamatan Dumai Kota 2021-2026.....	13
Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasararan	14
Tabel 2.3 Sasaran Prioritas Program Kecamatan Camat Dumai Kota Tahun 2022	15
Tabel 2.4 Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022.....	16
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022	16
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Dumai Kota	18
Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Dumai Kota.....	19
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Menurut Sasaran Strategis SKPD Tahun 2022.....	19
Tabel 3.1 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis Beserta Target Dan Realisasi Tahun 2022.....	21
Tabel 3.2 Tabel Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022.....	22
Tabel. 3.3 Matriks Permasalahan Serta Langkah-Langkah/Solusi Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022	30
Tabel 3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
Tabel 3.5 Pencapaian Realisasi Keuangan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022	35
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Dan Anggaran Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Langkah awal penataan sistem Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dianggap sebagai bentuk pemberian kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah sehingga daerah diharapkan mampu mandiri dan mengeksplorasi potensi-potensi daerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Adapun tata cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Kota Tahun Anggaran 2022 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kecamatan Dumai Kota dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (RENSTRA). Program-program yang tercantum dalam RENSTRA, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Kegiatan (RKK), Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus

disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan secara teknis, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Esensi dari Sistem AKIP bagi Kecamatan Dumai Kota adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di bidang pelayanan pemerintah khususnya. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Kecamatan Dumai Kota dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang dilaksanakan. Atas dasar tersebut, siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Kecamatan Dumai Kota. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Dumai Kota. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) memiliki dua fungsi utama sekaligus :

1. Laporan Kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Walikota Dumai, DPRD dan masyarakat).
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Dumai Kota sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

C. Isu Strategis

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, berbagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan ditingkat kecamatan yang diberikan harus sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam hal ini Kecamatan Dumai Kota menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan secara optimal untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi oleh Kecamatan Dumai Kota adalah :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan di Kecamatan, sehingga posisi Kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.
2. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan. Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

3. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi). Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.
4. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memiliki unit kerja/petugas ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Kecamatan belum melakukan koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan belum melaksanakan pelayanan terpadu serta dalam aktifitasnya tidak berkantor di Kantor Camat, namun masih berkantor di Kantor Dinas/Badan terkait.
5. Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegatif/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
6. Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government* dan *smart city*.
7. Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran masih belum optimal, Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai

sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Dumai sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, maka struktur organisasi Kecamatan Kota Dumai terdiri dari :

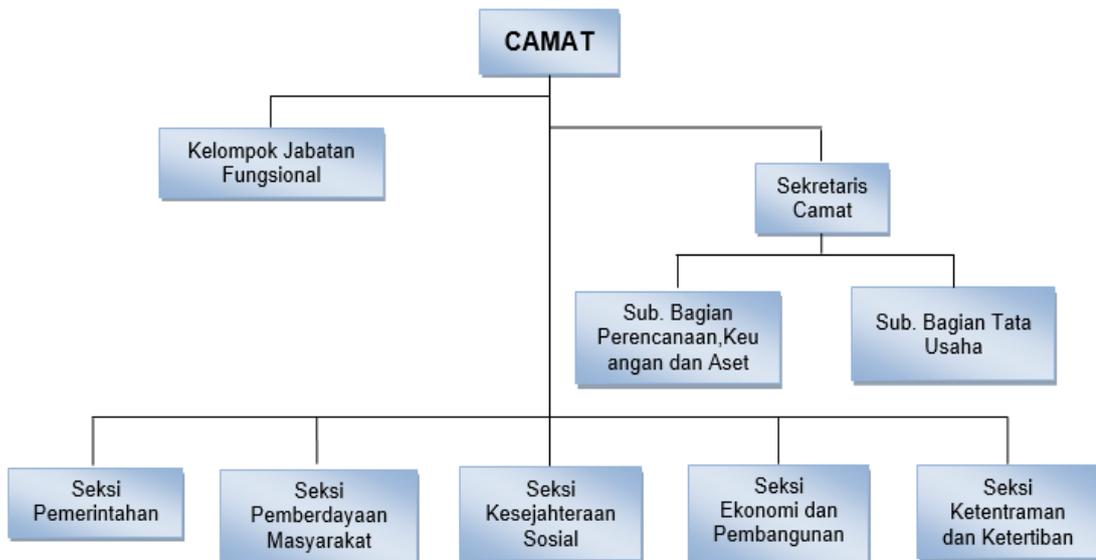
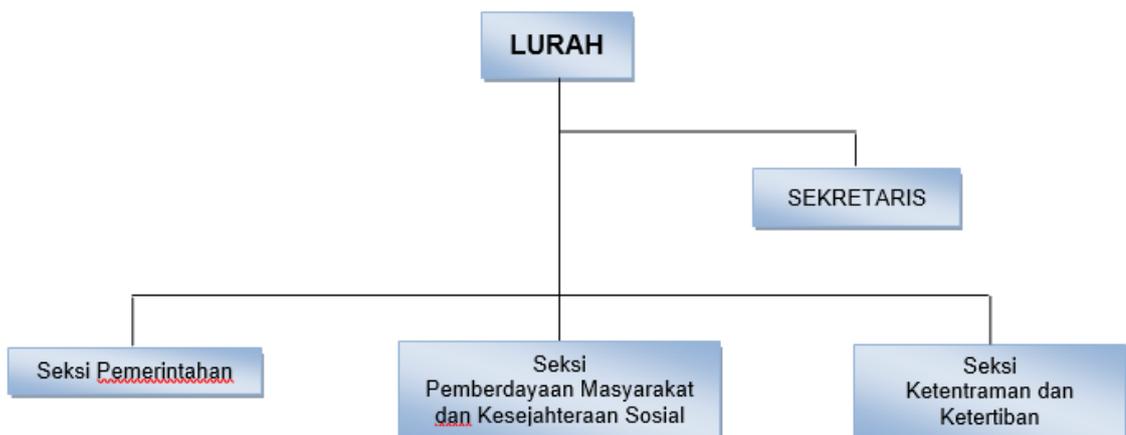
- **Kecamatan** :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- **Kelurahan** :

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar Bagan Organisasi di bawah ini :

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN DUMAI KOTA**BAGAN ORGANISASI KELURAHAN****E. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan ;

10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D) ;

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj-IP Tahun 2022, isu strategis, struktur organisasi Kecamatan Dumai Kota, dasar hukum dan sistematika pelaporan.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan secara singkat Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 diantaranya Visi, Misi dan cara-cara pencapaian tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Dumai Kota dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan capaian kinerja Kecamatan Dumai Kota tahun 2022 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis Kecamatan Dumai Kota 5 (Lima) tahun kedepan, tentunya harus selaras dengan Rencana Strategis pembangunan Kota Dumai yang disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016–2021, telah dilegalkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk periode lima tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai.

Di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dijabarkan pernyataan visi, misi, dan program Kepala Daerah serta memuat strategi pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD juga menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Hal ini juga tidak terlepas untuk Kecamatan Dumai Kota. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKPD, selanjutnya setiap SKPD menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD.

A. Rencana Strategis

Perencanaan kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Kerja Kecamatan Dumai Kota berorientasi pada Rencana Strategis

Kecamatan Dumai Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Dumai dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Dumai Kota Dumai dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021-2026.

a. Visi

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi Kecamatan Dumai Kota Dumai. Visi Kecamatan Dumai Kota merumuskan Visi Organisasi sebagai gambaran saat ini tentang keadaan organisasi di masa depan, yang realistis dan ingin diwujudkan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu. Untuk mendukung pencapaian Visi Kota Dumai Kecamatan Dumai Kota mempunyai visi :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.

b. Misi

Misi merupakan serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan perangkat daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, pernyataan misi diharapkan agar seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah mengetahui program-program yang akan dilaksanakan serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Pernyataan Misi Kota Dumai Kecamatan Dumai Kota adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai/mempercepat pencapaian tujuan yang ditetapkan.

c. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**

d. Sasaran

Sasaran Kecamatan Dumai Kota merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Dumai Kota yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sasaran kecamatan ditetapkan melalui analisis data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah Kecamatan Dumai Kota .

Berdasarkan sasaran Kecamatan Medang Kampai yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota**

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti tabel II.1 berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis RPJMD Kecamatan Dumai Kota 2021-2026

NO	SASARAN	Indikator Kinerja	Satuan	KONDISI AWAL 2021	TARGET					Kondisi Akhir (%) s/d 2026
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,72	87	87	88	88	88	88
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Persen	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	Persen	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategis penting untuk mensosialisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Dumai Kota. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

e. Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Dumai Kota dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik
2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
3. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada dikecamatan
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasararan

VISI : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik
			Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan	Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada dikecamatan
			Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	Mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan seusai dengan pelimpahan wewenang.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

f. Program

Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program Kerja Operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program operasional harus memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Untuk sasaran prioritas program pada Kecamatan Dumai Kota menyesuaikan dengan Program Lima Tahunan RPJMD Kota Dumai 2021-2026, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel II.2 berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Prioritas Program Kecamatan Camat Dumai Kota Tahun 2022

No	Sasaran Prioritas SKPD	Jumlah Program
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	4

Sesuai dengan penyesuaian nomenklatur program kegiatan sebagaimana Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terdapat 4 Program prioritas kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas Kecamatan Dumai Kota sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 2.4
Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022

No	Sasaran Prioritas Program	Program
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rp. 10.177.713.170) 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Rp. 67.485.922) 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Rp. 831.418.650) 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Rp. 104.800.000) 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Rp. 99.617.204)

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Dumai Kota menjelaskan antara pencapaian target sasaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Uraian ini berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022 menyesuaikan dengan Misi RPJMD Kota Dumai 2021 – 2026, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2022
1	2	3	4	5
1.	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik			
	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

C. Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota 2021 – 2026, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disusun setiap tahunnya. Laporan Kinerja (LKj) ini menjabarkan target yang dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan perangkat daerah yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Kecamatan Dumai Kota merupakan dokumen yang menyajikan realisasi dari Perjanjian Kinerja kinerja untuk tahun 2022. Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
- c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan)/*punishment* (sanksi).

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Walikota Dumai dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Dumai Kota

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	87	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 67.500.922 Rp 27.090.563 Rp 7.275.710 Rp 33.134.649
		2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 104.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 100.000.000
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 99.617.204 Rp. 99.617.204
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 831.418.650 Rp. 831.418.650

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kinerja Tahunan Kecamatan Dumai Kota menjelaskan antara pencapaian target triwulan sasaran strategis dengan pelaksanaan Indikator program dan kegiatan yang direncanakan sebagaimana pada table 2.6 berikut:

**Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Dumai Kota**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87	30	30	20	17
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100	25	25	25	25
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100	25	25	25	25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Kecamatan Dumai telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 ini. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Dumai Kota. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja, yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dari 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan, Kecamatan Dumai Kota telah berhasil mewujudkan hampir seluruh sasaran tersebut.

A. Capaian Kinerja Perangkat daerah

Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Kota diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Pengumpulan dan Pengelolaan Kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Kecamatan Medang Kampai sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan yang meliputi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pelayanan umum serta keamanan dan ketertiban. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan

pengukuran kinerja dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Tahunan (RKT)

Secara umum Kecamatan Dumai Kota telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai wujud dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran strategis tersebut, hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi kinerja program kegiatan masing-masing indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis Beserta Target Dan Realisasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahunan	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	89,87	103,2
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100	100	100

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis di atas pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % untuk indikator kinerja. Pencapaian tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program berikut ini:

- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
 - ❖ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - ❖ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan :**
 - ❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :**
 - ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:**
 - ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Dumai Kota merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Kota untuk setiap pernyataan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Tabel Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap Renstra 20226 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,72	87	89,87	103,2	88	103%
2.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	60%	100%	100	100	100%	100%
3.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	60%	100%	100	100	100%	100%

Dari Tabel Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

a. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target kinerja tahun 2022 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2022 adalah 87, sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2022 adalah 89,87 dan tingkat capaian sebesar 103%, sebagaimana keterangan dibawah ini :

$$y = a / b \times 100 \% \text{ ----> } 89,87 / 87 \times 100\% = 103,2 \%$$

y = Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

a = Nilai realisasi Indikator Kinerja

b = Target Kinerja Indikator

Target capaian kinerja pada indicator kinerja sasaran ini tercapai, sebagaimana hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan dumai kota. Kecamatan melakukan tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2022 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2022 (100%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2022 adalah (100%) dan tingkat capaian sebesar (100%), Terdapat dua program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai indicator kinerja tersebut antara lain Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan melalui kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Kegiatan tersebut melibatkan Forkopimcam dilingkungan Kecamatan Dumai Kota dalam rangka meningkatkan ketentraman dan Ketertiban umum. Kecamatan Dumai Kota bersama dengan Forkopimcam melaksanakan Monitoring ke tempat tempat yang terindikasi dapat terjadi berbagai jenis penyakit masyarakat seperti Gelanggang Permainan (Gelper), Warnet, dan tempat tempat karaoke dan billiard dilingkungan Kecamatan Dumai Kota. Monitoring merupakan langkah pencegahan penyakit

masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dapat dikendalikan. Setiap Lurah di Kecamatan Dumai Kota mengupayakan pembangunan balai kemitraan yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan FKPM untuk dijadikan menyelesaikan masalah sosial di setiap kelurahan. Selain itu berkoordinasi dengan Ketua RT dan masyarakat untuk pelaksanaan siskamling pada masing-masing RT. Dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Kecamatan Dumai Kota akan melibatkan elemen masyarakat maupun pihak Upika, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik maupun masalah pencurian dilingkungan Kecamatan Dumai Kota. Dengan kondisi ini keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah Kecamatan Dumai Kota akan aman dan terkendali.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan berupa pelaksanaan kegiatan MTQ di tingkat kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan kegiatan Lomba Anak Idaman. Adapun indicator kegiatan ini berupa pelaksanaan 4 jenis lomba yang dilaksanakan pada kegiatan MTQ sebagai bentuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di lingkungan kecamatan Dumai Kota.

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2022 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2022 (100%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2022 adalah (100%) dan tingkat capaian sebesar (100%), Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan Indikator kinerja Pelakasaan pelimpahan kewenangan kepada Camat. Pada Tahun 2022, terdapat 5 urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang telah dilaksanakan di Kecamatan Dumai Kota terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan bidang kesehatan
2. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
3. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
4. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan
5. Urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan

Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, maka pada Tahun 2022 ini Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut.

Urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan persampahan diwilayah kerja Kecamatan khususnya pada 5 (lima) Kelurahan. Kecamatan Dumai Kota mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang petugas yang tersebar pada 5 (lima) Kelurahan. Cakupan pelayanan persampahan adalah lingkungan perumahan dan drainase. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan terhadap kebersihan, Camat Dumai Kota membentuk kelompok sadara kebersiha kecamatan Dumai Kota. Kelompok ini beranggotakan Petugas Persampahan serta sifasilitasi kencanaan roda tiga persampahan sebanyak 27 unit pada tahun 2022.

Urusan pemerintahan bidang Kesehatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di Pos Pelayanan terpadu (POSYANDU). Terdapat 45 POSYANDU dilingkungan kecamatan dumai kota dengan jumlah kader sebanyak 225 orang. Selain penyediaan fasilitas, pemberian honor bagi para kader posyandu serta penyediaan makanan tambahan juga diupayakan selama setahun setiap bulannya.

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan dalam bentuk pelatihan bagi kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan dan kecamatan. Pembinaan

Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun tetangga di Kelurahan dan Kecamatan serta Penilaian Bulan bhakti Gotong Royong dan Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan. Sebanyak 87 Ketua RT serta 60 anggota LPMK yang ada di Kecamatan Dumai Kota. Penyediaan honor bagi Ketua RT dan LPMK dilaksanakan oleh kecamatan selama setahun setiap bulannya.

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dilaksanakan oleh kelurahan melalui anggaran kelurahan yang diberikan kepada kecamatan. Kegiatan ini berupa penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada di kelurahan.

Urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dilaksanakan Kecamatan Dumai Kota dalam bentuk penyelenggaraan Muswarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Rencana Pembangunan dilaksanakan mulai dari tingkat RT, Kelurahan dan tingkat kecamatan. Peningkatan partisipasi masyarakat Dumai Kota dibidang perencanaan pembangunan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat Kecamatan Dumai Kota yang berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat Kota Dumai.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021)

a. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2021 Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dumai Kota adalah sebesar 85,72 pada tahun 2022 naik menjadi 89,87 termasuk dalam kategori “BAIK”

b. Indikator Kinerja Sasaran : Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Pada tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah sebesar 60% sama dengan tahun 2022 sebesar 100% termasuk dalam kategori “BAIK”

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat meningkat Pada tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat adalah sebesar 60% menjadi 100 % termasuk dalam kategori “BAIK”

Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Tahun 2020 – 2021



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah

a. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 102,1 % dari target yang ditetapkan.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja program yang telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100%, hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi kinerja program dan kegiatan masing-masing indikator sebagai berikut :

- a. Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 untuk semua kegiatan tingkat keberhasilan realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 100 % sesuai dengan target Renstra tahun 2021-2026.

Selain itu analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dibagi ke dalam 2 (dua) batasan yakni internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Kecamatan Dumai Kota sebagai berikut :

a. ANALISIS FAKTOR INTERNAL

Kekuatan yang terdiri dari :

- PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan
- Adanya pelimpahan wewenang dari Walikota Dumai (Keputusan Walikota Dumai Nomor 197 Tahun 2021)
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Tersedianya standar pelayanan minimal dan prosedur operasi standar
- Adanya model musyawarah perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up*
- Kuantitas aparatur yang memadai (PNS 47, TKPK/Honorer 24)

Kelemahan yang terdiri dari :

- Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat
- Masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan

- Belum optimalnya penataan dan penggunaan ruang

b. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

Peluang yang terdiri dari :

- Adanya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
- Adanya keleluasaan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Posisi wilayah Kecamatan yang terletak di pusat Kota Dumai
- Situasi pembangunan dan investasi yang kondusif
- Adanya lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang kegiatan pemerintah (RT, LPMK, Karang Taruna)
- Memiliki peluang untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha dalam kesertaan membangun wilayah dan masyarakat

Ancaman yang terdiri dari :

- Belum jelasnya peta koordinasi antar instansi
- Masih rendahnya semangat gotong royong dalam masyarakat
- Semakin kritisnya tuntutan masyarakat terhadap percepatan pembangunan daerah
- Tuntutan pelayanan prima
- Rendahnya kepedulian pihak pengusaha (swasta) yang berada di Kecamatan Dumai Kota terhadap pembangunan wilayah dan masyarakat
- Kebijakan yang sering berubah

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis mengenai akuntabilitas kinerja di atas, untuk mengatasi permasalahan - permasalahan yang dihadapi tersebut diperlukan langkah-langkah/solusi, diuraikan melalui tabel matriks sebagai berikut:

Tabel. 3.3 Matriks Permasalahan Serta Langkah-Langkah/Solusi Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022

NO.	PERMASALAHAN	LANGKAH-LANGKAH/SOLUSI
1	2	3
1.	Keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak massa dalam berbagai kegiatan pemerintahan.	Penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Dumai Kota ditingkatkan secara optimal dalam menangani urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Walikota.
2.	Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang lambat dan aparatur yang kurang profesional, serta belum banyaknya SDM kecamatan yang diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur kecamatan.	Kecamatan Dumai Kota akan terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal, akan segera mengusulkan SDM kecamatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam bertugas.
3.	Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi didalam menjalankan tugas, masih rendahnya kepedulian pihak swasta/ pengusaha terhadap pembangunan, serta masih rendahnya peran Musrenbang didalam pembangunan wilayah.	Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas, peran serta aktif dari masyarakat, swasta dan pengusaha yang mendukung program dan kegiatan pembangunan pada Kecamatan Dumai Kota, adanya model musyawarah perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up untuk mengoptimalkan penataan dan penggunaan ruang pembangunan wilayah dan masyarakat Kecamatan Dumai Kota.
4.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya dan masih kurangnya koordinasi antar Ketua RT, masyarakat maupun unsur Kecamatan terhadap pelaksanaan Siskamling pada masing-masing RT.	Diadakannya koordinasi antar Ketua RT yang dikoordinir Lurah dengan masyarakat dan unsur Kecamatan agar kepedulian terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggal terpelihara dan terjaga dengan diadakannya Siskamling.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2022 Pada Tabel 3.3 :

Tabel 3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 =
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik Kualitas sumber daya lembaga masyarakat Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	100%	98,96%	1,03

KET : Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja)

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.177.713.170 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.874.675.806 atau 97 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

1. Penyediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 15.685.087,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 14.681.000 00 atau 94%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.798.612.403,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 5.563.043.761,00 atau 96%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4.875.455,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.053.500,00 atau 83%.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 73.500.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 73.500.000,00 atau 100%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 460.728.500,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 427.311.014,00 atau 93%.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 125.645.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 119.375.000,00 atau 100%.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 3.039.975.725,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.020.155.006,00 atau 99%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 658.691.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 652.556.525,00 atau 99%.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 67.485.922,00 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 66.139.310,00 atau 98% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 27.090.563,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 25.744.000,00 atau 95%.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 7.275.710,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 7.275.710,00 atau 100%.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 33.119.649,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 33.119.600,00 atau 100%.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 831.418.650,00 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 807.729.780,00 atau 97% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 831.418.650,00 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 807.729.780,00 atau 97%.

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 104.800.000,00 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 96.609.900,00 atau 92% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 91.809.900,00 atau 92,00%.

2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.800.000,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00 atau 100%.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 99.617.204,00 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 99.617.204,00 atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 99.617.204,00 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 99.617.204,00 atau 100%.

**Tabel 3.5 Pencapaian Realisasi Keuangan
Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.177.713.170,-	9.874.675.806,-	97 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	67.485.922,-	66.139.310,-	98%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	831.418.650,-	807.729.780,-	97 %
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	104.800.000,-	96.609.900,-	92 %
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	99.617.204,-	99.617.204,-	100 %
TOTAL BELANJA		11.281.034.946,-	10.944.772.000,-	97 %

B. Realisasi Anggaran

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap program rencana kerja Kecamatan Dumai Kota Tahun Anggaran 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran sebesar 1.070.096.194,- dari jumlah anggaran 1.103.336.776,- atau 96,98% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Realisasi kinerja dan anggaran Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022 yang disesuaikan dengan laporan E-Monev Triwulan IV dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Dan Anggaran Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	89,87	103,2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	67.500.922	66.139.310	97,98%
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100	100	100	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	831.418.650	807.729.780	97,15%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100	100	100	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	104.800.000	96.609.900	92,19%
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	99.617.204	99.617.204	100,00%

Sumber: Data Laporan Monev Triwulan IV Tahun 2022 (E-Monev)

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Kecamatan Dumai Kota yang dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Rencana Strategis, Kecamatan Dumai Kota telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kecamatan dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kota Dumai.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya di evaluasi pencapaian kinerja di atas. Terlihat seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian, secara umum Kecamatan Dumai Kota telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di Kecamatan, serta membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pemerintahan umum.

Walaupun demikian, masih sangat disadari dan masih diperlukan perbaikan pada berbagai kegiatan sehingga dapat dipertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022 ini kami susun sebagai laporan sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai dalam rangka turut menciptakan **good governance** and **clean government**.

CAMAT,



INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si
Pembina

NIP. 19820211 200312 1 004

Lampiran**Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2022**

NO	URAIAN PRESTASI	PEMENANG	TINGKAT LOMBA	PENYELENGGARA
1	JUARA I Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan	Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai	PEMERINTAH KOTA DUMAI
2	Terbaik III Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kluster Tambahan	Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai	INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
3	Terbaik I Realisasi PBB	Kecamatan Dumai Kota	Kota Dumai	BAPENDA KOTA DUMAI
4	Teraik II Sebagai Kampung KB Keluarga Berkualitas	Kelurahan Laksamana	Provinsi Riau	BKKBN PROVINSI RIAU
5	Juara II lomba kebersihan tingkat kelurahan se-kota Dumai dalam rangka hari Lingkungan Hidup tahun 2022	Kelurahan Bintang	Kota Dumai	DLH KOTA DUMAI



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN DUMAI KOTA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA SAFAWI, S.Sos, M.Si

Jabatan : CAMAT DUMAI KOTA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 07 Oktober 2022



Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN DUMAI KOTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Sasaran 1	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp. 67.500.922 1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 27.090.563 1.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 7.275.710 1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 33.134.649 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 831.418.650 2.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 831.418.650 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 104.800.000 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 4.800.000 3.2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 100.000.000 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 99.617.204 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp. 99.617.204 	<p>Jumlah Rp. 1.103.336.776</p>
-----------	--	--	---------------------------------

Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI
H. RAISAL SWM, MARS



Dumai, 07 Oktober 2022
Pihak Pertama
CAMAT
KOTA AWA, S. S. M. S. I
NIP. 19820211-2003121-004





PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN DUMAI KOTA

Jalan Pattimura No. 01, Telepon (0765) 440287 Kode Pos: 28821
Email : kecamatan_dumai_kota@yahoo.co.id
DUMAI

KEPUTUSAN CAMAT DUMAI KOTA

Nomor : 134 /Kpts – DK/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DUMAI KOTA

TAHUN 2021-2026

CAMAT DUMAI KOTA

MENIMBANG : a. bahwa berkenaan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka perlu melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumai Kota yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Dumai Kota.

MENINGAT : 1. Undang- undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 – 2024
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan;
12. Peraturan Walikota Dumai 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT DUMAI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN 2021 – 2026.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumai Kota, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Dumai Kota untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota 2021 – 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, disusun dengan mengacu kepada kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dumai Kota dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Dumai
Pada Tanggal, 01 Maret 2022

CAMAT,



INDRA SAFAWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT DUMAI KOTA
 NOMOR : 134/Kpts – DK/2022
 TANGGAL : 01 Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI TAHUN 2021– 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1		3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Keteriban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2 Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Indeks %	87 100	87 100	88 100	88 100	88 100
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100	100	100	100	100

Ditetapkan di Dumai
 Pada Tanggal, 01 Maret 2022

CAMAT,

 INDRASAFAWI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN DUMAI KOTA**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Sasaran (3)	Satuan (4)	Target Tahunan 2021
				(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Dumai, 07 Oktober 2022,

CAMAT



**EVALUASI BERKALA RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022 BERKALA
KECAMATAN DUMAI KOTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Situasi	Target Tahunan	Target / Realisasi												Realisasi Tahunan 2022	Persen (18)	
					Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4					
					TARGET (5)	REALISASI (6)	Persen (7)	TARGET (8)	REALISASI (9)	Persen (10)	TARGET (11)	REALISASI (12)	Persen (13)	TARGET (14)	REALISASI (15)	Persen (16)			
(1)	(2)		(3)	2022												(17)	(18)		
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi dan UKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	30	30	100	60	60	100	80	80	100	80	80	100	89,87	103	103,30
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Transibum	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	75	75	100	100	100	100,00
		Persentase Pelaksanaan Pelempahan Kewenangan Kepada Camat	%	100	20	50	250	40	75	187,5	100	90	90	100	100	100	100	100	100,00

Dumai, 07 Oktober 2022,

